

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

A. Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Keadaan Geografis

1.1 Keadaan Alam

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta dibagian selatan dibatasi lautan Indonesia, sedangkan dibagian timur laut, tenggara, barat dan barat laut dibatasi oleh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi :

- Kabupaten Kelaten disebelah timur laut
- Kabupaten Wonogiri disebelah tenggara
- Kabupaten Purworejo disebelah barat
- Kabupaten Magelang disebelah barat laut

Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

- Pegunungan Selatan,
 - Luas : $\pm 1.656,23 \text{ km}^2$
 - Ketinggian : 150-700 m

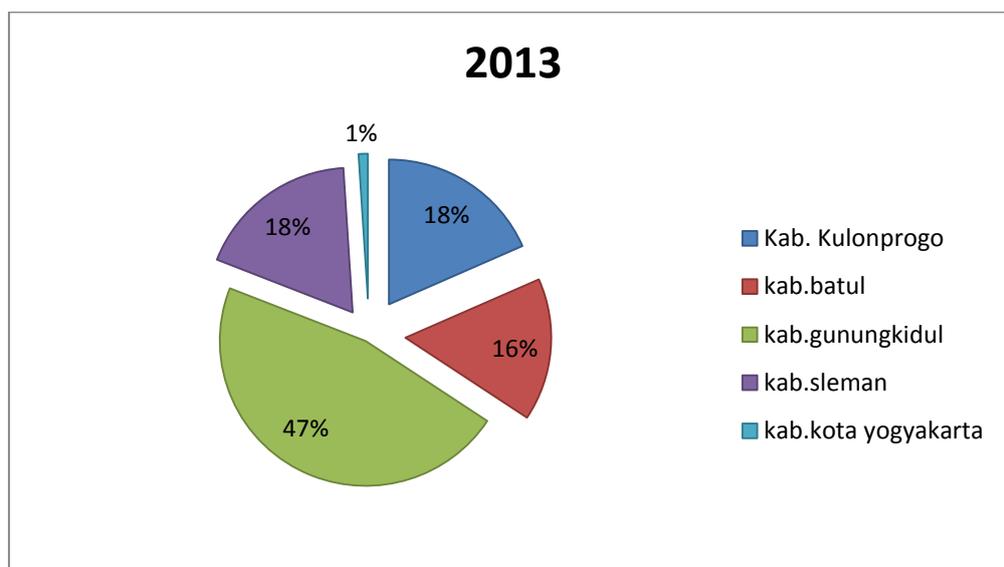
- Gunung berapi Merapi,
 - Luas : $\pm 582,81 \text{ km}^2$
 - Ketinggian : 80-2.991m
- Dataran rendah antara pegunungan selatan dan pegunungan Kulonprogo
 - Luas : $\pm 215,62 \text{ km}^2$
 - Ketinggian : 0-80 m
- Pegunungan Kulonprogo dan dataran rendah selatan,
 - Luas : $\pm 706,62 \text{ km}^2$
 - Ketinggian : 0-572 m

Posisi D.I Yogyakarta yang terletak antara $7^{\circ},33' - 8^{\circ}.22'$ lintang selatan dan $110^{\circ}.50'$ bujur timur, tercatat memiliki luas $3.185,80 \text{ km}^2$ atau 0,17 persen dari luas Indonesia ($1.860.359,67 \text{ km}^2$), merupakan provinsi terkecil setelah provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :

- Kabupaten Kulonprogo, dengan luas $568,27 \text{ km}^2$ (18,40 persen)
- Kabupaten Bantul, dengan luas $506,85 \text{ km}^2$ (15,91 persen)
- Kabupaten Gunung Kidul, dengan luas $1.485,36 \text{ km}^2$ (46,63 persen)
- Kabupaten Sleman, dengan luas $574,82 \text{ km}^2$ (18,04 persen)
- Kota Yogyakarta, Dengan luas $32,50 \text{ km}^2$ (1,02 persen)

Grafik 2.1

Persentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Di D.I.Yogyakarta
(Persen)



Sumber : *D.I.Y Dalam Angka Tahun 2014*

2. Pemerintahan

2.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah pimpinan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pimpinan daerah bertanggungjawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai legislatif. Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin oleh seorang gubernur dengan ibu kota provinsi adalah Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan tugasnya, dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat terhadap unsur-unsur pembantu pimpinan

pemerintah daerah yaitu sekretaris daerah (setda) dan lembaga teknis daerah seperti dinas-dinas, badan, badan dan kantor-kantor.

Sekretaris daerah membawahi tiga asisten yaitu :

1. Asisten Pemerintah dan Kesra :
 - a. Biro Tata Pemerintahan
 - b. Biro Hukum
 - c. Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakatan
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
 - a. Biro Adm. Perekonomian dan SDA
 - b. Biro Administrasi Perekonomian
3. Asisten Administrasi Umum :
 - a. Biro Organisasi
 - b. Biro Umum Humas dan Protokol

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa yaitu :

- Kabupaten Kulonprogo terdiri dari 12 kecamatan dan 88 kelurahan/desa
- Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan dan 75 kelurahan/desa
- Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 kecamatan dan 144 kelurahan/desa
- Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan/desa

- Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan/desa

B. Profil BPS Provinsi D.I.Yogyakarta

Berdasarkan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasinya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah sebagai berikut :

1. Kedudukan

BPS Provinsi adalah perwakilan BPS daerah yang berada di bawah tanggungjawab kepada kepala BPS.

2. Tugas

BPS Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan statistik dasar.
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS provinsi.
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi.

- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga BPS provinsi. ¹

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga non departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS adalah lembaga vertikal dan memiliki perwakilan disetiap ibukota provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan disetiap kecamatan paling tidak terdapat seorang koordinator statistik yang bertanggungjawab dalam pengumpulan data statistik diwilayahnya.

Dalam rangka mendukung tugas-tugas dan fungsi BPS, maka BPS menetapkan Visi dan Misi BPS sebagai berikut :

1. VISI BPS

Visi BPS adalah sebagai “Pelopor Statistik Terpercaya Untuk Semua”

2. MISI BPS :

1. Menyediakan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir dan berkesinambungan
2. Meningkatkan upaya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien.

¹ Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2013

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara optimal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

Menurut UU tentang statistik, statistik dikelompokkan menjadi 3 jenis :

1. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
2. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
3. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.

3. Data BPS

BPS sebagai badan penyedia informasi statistik untuk keperluan pemerintah, swasta dan masyarakat, BPS berusaha memenuhi kebutuhan data tersebut. Data yang tersedia di BPS

meliputi data pertanian, komunikasi, indeks harga konsumen, pengeluaran dan konsumsi, konstruksi, energi, perdagangan luar negeri, pertambangan, keuangan, penduduk, pariwisata, transportasi, pendapatan dan indeks harga.

4. Layanan BPS

BPS menghasilkan keragaman data statistik baik sosial maupun ekonomi, yang dimanfaatkan baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat umum. Informasi dikemas baik dalam bentuk media cetak seperti buku, maupun media elektronik seperti publikasi elektronik dan internet. Untuk memenuhi kebutuhan statistik yang amat beragam, BPS dapat menyediakan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna data.

Selain itu, beberapa layanan lainnya yang dapat diberikan antara lain :

1. Perencanaan survei, sampling maupun perencanaan kuesioner
2. Pelatihan komputer dan statistik
3. Konsultasi statistik

5. Kontak BPS

Produk BPS dapat diperoleh baik di BPS pusat maupun perwakilan BPS di setiap ibukota provinsi/kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

6. Struktur organisasi

1. Kepala

2. Bagian Tata Usaha

- a) Sub Bagian Bina Program
- b) Sub Bagian Urusan Dalam
- c) Sub Bagian Kepegawaian
- d) Sub Bagian Keuangan
- e) Sub Bagian Perlengkapan

3. Bidang Statistik Sosial

- a) Seksi Statistik Kependudukan
- b) Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat
- c) Seksi Ketahanan Sosial

4. Bidang Statistik Produksi

- a) Seksi Statistik Pertanian
- b) Seksi Statistik Industri
- c) Seksi Statistik Pertambangan Energi dan Konstruksi

5. Bidang Statistik Distribusi

- a) Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Pedagang Besar
- b) Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen
- c) Seksi Statistik Niaga dan Jasa

6. Bidang Neraca Wilayah dan Analisa Statistik

- a) Seksi Neraca Produksi
- b) Seksi Neraca Konsumsi

c) Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor

7. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

a) Seksi Integrasi Pengolahan Data

b) Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik

c) Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik

Gambar 2.2

Struktur Organisasi BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

